PAJAMKEU : Pajak dan Manajemen Keuangan
Volume. 1 No. 1 Februari 2024
e-ISSN : 3046-9848, dan p-ISSN : 3046-899X, Hal. 101-116
DOI: https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v1i3.274
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/PAJAMKEU

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten Karawang Tahun 2020-2022

Satrio Budi Prakoso
Universitas Buana Perjuangan Karawang
mn21.satrioprakoso@mhs.ubpkarawang.ac.id

Uus MD Fadli
Universitas Buana Perjuangan Karawang
uus.fadli@ubpkarawang.ac.id

Alamat: Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361
Korespondensi penulis: mn21.satrioprakoso@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstract. *Analyse the regional independence ratio, effectiveness ratio, and efficiency ratio to see how the financial performance of the Karawang Regency local government. Objective To analyse the fiscal performance of the Karawang Regency local government. Governments conduct financial performance analyses to measure their efficiency, identify areas for improvement, assess their current and future financial health, determine whether they can meet their obligations, and monitor compliance with spending plans. The researchers in this study relied on quantitative techniques. Data is collected using research instruments and analysed quantitatively and statistically with the aim of testing predetermined hypotheses, as explained by Sugiyono (Quantitative, 2016). This research method is based on the philosophy of positivism..budget year 2020 is 72.01% 2021 regional financial independence ratio 68.14% with the 2022 budget year the percentage has increased 70.80% the effectiveness ratio 2020 is 119.22% 2021 115.74% is categorised as very effective 2022 99.76% is categorised as quite effective.The efficiency of the Karawang Regency Regional Revenue Agency in the 2020 budget year was 95.31% 2021 the effectiveness ratio experienced an increase of 94.32% the 2022 budget experienced a significant increase of 100.09% categorised as inefficient From 2020 to 2022, the percentage of patients with RKKD on the knee is 2020 72.01%, 2021 68.14% & 2022 70.80%, REPAD in order: 119.22%, 115.74% & 99.76% from 2020 to 2022. From 2020 to 2022, the RECD figures are 95.31%, 94.32% and 100.09%. This is because with PAD, the Realisation of Regional Expenditure of the Karawang district government from 2020 to 2022*

Keywords: *PAD, Financial Performance, Karawang Regency, Regional financial independence ratio Effectiveness ratio, Efficiency ratio*

Abstrak. Menganalisis rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi untuk melihat bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karawang. TujuanMenganalisis kinerja fiskal pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Pemerintah melakukan analisis kinerja keuangan untuk mengukur efisiensi mereka, mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu ditingkatkan, menilai kesehatan keuangan mereka saat ini dan di masa depan, menentukan apakah mereka dapat memenuhi kewajibannya, dan memantau kepatuhan terhadap rencana pengeluaran. Para peneliti dalam penelitian ini mengandalkan teknik kuantitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen penelitian dan dianalisis secara kuantitatif dan statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (Kuantitatif, 2016). Metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat positivisme..tahun anggaran 2020 sebesar 72.01% 2021 rasio kemandirian keuangan daerah 68,14% dengan tahun anggaran 2022 persentasenya mengalami kenaikan 70,80% rasio efektifitas 2020 sebesar 119,22% 2021 115,74% dikategorikan sangat efektif 2022 99,76% dikategorikan cukup Efektif.efisiensi badan pendapatan daerah Kabupaten Karawang tahun anggaran 2020 sebesar 95,31% 2021 rasio efektifitas mengalami penaikan 94,32% anggaran 2022 mengalami penaikan signifikan yaitu 100,09% dikategorikan tidak efisienDari tahun 2020 hingga 2022, persentase pasien dengan RKKD pada lutut adalah 2020 72,01% ,2021 68,14% & 2022 70,80%,REPAD secara berurutan: 119,22%, 115,74% & 99,76% dari tahun 2020 hingga 2022 Dari tahun 2020 hingga 2022, angka REKD adalah 95,31%,94,32%dan 100,09%. Hal ini disebabkan karena dengan PAD, Realisasi Belanja Daerah Pemerintah pemerintah kabupaten karawang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022

Kata kunci:*PAD,Kinerja Keuangan,Kabupaten Karawang,Rasio kemandirian keuangan daerah Rasio efektifitas,Rasio efisiensi*

Received April 01, 2024; Accepted Mei 24, 2024; Published Juni 30, 2024
** Satrio Budi Prakoso, mn21.satrioprakoso@mhs.ubpkarawang.ac.id*

LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia mengalami banyak perubahan setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Desentralisasi mulai terjadi pada sistem pemerintahan yang awalnya terpusat. Pemerintah daerah mendapatkan otonomi sebagai hasil dari desentralisasi. Disahkannya Undang-Undang Pemerintah Daerah Hal ini ditunjukkan oleh No. 22/1999. Aturan ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada daerah. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas hal-hal seperti ekonomi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan harus mampu mengelola uang dan menjalankan pemerintahan secara terbuka. Masyarakat berharap pemerintah daerah lebih baik dalam mencari peluang untuk menghasilkan uang, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendanaan daerah untuk pemerintahan dan pertumbuhan. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu mengetahui bagaimana mengatur pemerintahan mereka untuk membuat tata kelola yang baik dan mengevaluasi kemajuan mereka sendiri secara teratur dalam jangka waktu tertentu.

instansi pemerintahan merupakan organisasi yang terdiri dari berbagai lembaga dengan sekumpulan sumber daya manusia yang dipilih berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugas negara demi mewujudkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan hidup melalui pelayanan publik dari lembaga instansi yang ada (Apriyanti & Fadli, 2023)

Tujuan melakukan analisis kinerja keuangan adalah untuk menilai efisiensi dan efektivitas pemerintah, serta memastikan kesehatan keuangan, potensi pendapatan atau sumber daya ekonomi, kapasitas untuk melaksanakan tugasnya, dan kepatuhan terhadap peraturan mengenai alokasi dana. Salah satu metode untuk mengevaluasi kestabilan finansial adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan..

Standar keberhasilan yang telah ditetapkan diperlukan agar kinerja individu atau kelompok bisa dinilai. Pengukuran kinerja membantu menilai sejauh mana hasil mendekati tujuan yang ditetapkan. Perencanaan strategis adalah fondasi organisasi, yang meliputi visi, misi, dan kebijakan. Dari sana, penetapan tujuan, pembuatan program dan anggaran, serta pembagian tugas dan fungsi, semuanya harus merujuk pada perencanaan strategis yang telah dibuat.

KAJIAN TEORITIS

Mahmudi menekankan bahwa teknik analisis laporan keuangan berguna untuk mengevaluasi kinerja finansial suatu daerah. Menurut Mahmudi, laporan keuangan perlu dianalisis untuk menggambarkan kinerja finansialnya. Tujuan dari pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk menilai keefektifan keuangan dengan memahami makna data yang terdapat dalam laporan keuangan. Hasil analisis ini dapat menjadi landasan untuk pengambilan keputusan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan politik, sehingga memungkinkan kesimpulan tentang kinerja finansial daerah. Secara spesifik, ini berhubungan dengan pencapaian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, termasuk pendapatan dan pengeluaran. Penilaian komparatif atas hasil-hasil ini kemudian dapat dilakukan antar daerah(Karina & Noerainy, 2016).

A. Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Dessler Menjelaskan evaluasi kinerja sebagai proses menilai pencapaian karyawan saat ini atau dalam masa lampau terhadap standar prestasi yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja digunakan untuk mengukur sumbangan individu (karyawan) terhadap organisasi di mana mereka bekerja. Dessler mengilustrasikan model penilaian kinerja yang mencakup indikator sebagai berikut:

1.Kualitas pekerjaan melibatkan akurasi, ketuntasan, dan penerimaan tugas yang diselesaikan.Dalam periode waktu tertentu, Produktivitas adalah hasil dari jumlah dan efisiensi pekerjaan yang dilakukan.

2.Pengetahuan pekerjaan terdiri dari informasi dan kemampuan praktis/teknis yang digunakan dalam pekerjaan;

3.Ketergantungan berkaitan dengan Seberapa dapat diandalkan seorang karyawan dalam menyelesaikan tugasannya dan memenuhi harapan.

4.Kehadiran berkaitan dengan sejauh mana seorang karyawan mematuhi waktu istirahat dan makan yang telah ditentukan, tepat waktu, dan menyimpan Rekam jejak kehadiran mereka secara keseluruhan.

5.Kemandirian mengacu pada seberapa jauh pekerjaan dapat dilakukan sendiri atau memerlukan pengawasan minimal.(Sains, 2018)

B. Rasio Kemandirian

Kemampuan sebuah wilayah untuk membiayai proyek-proyek pemerintah, pembangunan, dan layanan masyarakatnya sendiri dapat dilihat dari (RKKD) mengindikasikan

seberapa mandiri suatu wilayah. mampu mendanai inisiatif publik dan layanan masyarakat sendiri dengan pendapatan pajak dan retribusi yang telah dikumpulkan, yang merupakan sumber dana penting bagi Di suatu lokasi, Kemampuan suatu daerah untuk mengandalkan sumber daya sendiri dibandingkan dengan sumber-sumber dari luar Berikut ini adalah beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghitung Rasio Kemandirian::

Rasio kemandirian mengukur sejauh mana suatu daerah dapat menopang kegiatan pemerintahan, inisiatif pembangunan, dan layanan masyarakat secara finansial dari pendapatan yang dihasilkan dari pajak dan retribusi yang dikumpulkan di dalam wilayah tersebut

Penjelasan mengenai pola hubungan rasio kemandirian

1. Polanya terdiri dari ketergantungan instruktif, di mana pemerintah pusat mengambil alih fungsi otonomi daerah di wilayah yang tidak mampu melaksanakannya sendiri.

2. Pola interaksi konsultatif, di mana daerah dianggap memiliki kemampuan sedikit lebih baik dalam menjalankan otonomi daerah, sehingga Intervensi dari pemerintah pusat mulai menurun..

3. Pola Pemerintah pusat semakin berkurang perannya karena daerah menjadi lebih partisipatif. sudah hampir siap untuk mengelola urusan terkait otonomi daerah.

4. Pola delegatif, di mana urusan otonomi daerah sepenuhnya diawasi oleh masing-masing negara bagian atau teritori secara independen dari pemerintah federal.

C. Rasio Efektifitas

Rasio Efektivitas PAD mencerminkan seberapa efisien Untuk membantu pemerintah daerah mencapai target pendapatannya, pemerintah daerah menetapkan target sebelumnya dengan mempertimbangkan potensi ekonomi. Semakin besar tingkat keberhasilan pendapatan daerah, semakin besar pula efisiensi yang terdapat pada daerah tersebut dalam mencapai pendapatan yang telah ditargetkan kapasitas pemerintah daerah. Konsep efektivitas ini berkaitan dengan seberapa baik operasi sektor publik mencapai tujuan yang telah ditetapkan; karena itu, suatu tindakan dianggap efektif jika secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk memberikan layanan masyarakat yang telah ditargetkan. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah lebih efektif ketika Ketika realisasinya melampaui target yang ditetapkan, dan sebaliknya, ketika target kurang tercapai dari realisasi pendapatan yang dihasilkan (Putra, 2018: 63). Informasi selanjutnya diperlukan untuk menghitung rasio efektivitas:

D. Rasio Efisiensi

Dengan melihat rasio efisiensi keuangan daerah, kita dapat melihat berapa banyak uang yang dihasilkan dibandingkan dengan berapa banyak yang dibelanjakan untuk menghasilkan

pendapatan. Untuk menentukan rasio efisiensi, pemerintah daerah harus cermat dalam menentukan pengeluaran yang terkait dengan perolehan pendapatan, menurut Halim menilai efisiensi proses pengumpulan pendapatan tersebut. Langkah ini penting karena walaupun pemerintah daerah mungkin berhasil mencapai target pendapatannya Meskipun sesuai dengan yang telah ditetapkan, keberhasilan tersebut memiliki arti yang kurang signifikan jika biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target tersebut melebihi pendapatan yang diperoleh.

E. Hipotesis

Setelah presentasi kerangka berpikir dan landasan teori, langkah ketiga dalam penelitian adalah perumusan hipotesis. Hipotesis dibuat sebagai solusi temporer untuk masalah yang akan diteliti.dan dievaluasi untuk menunjukkan kebenaran atau kebohongan dengan cara yang tidak bergantung pada prinsip.

1. Rasio kemandirian keuangan daerah dengan kinerja keuangan

dalam teori agensi, di mana perusahaan berfungsi sebagai dasar teori untuk praktik bisnis. Teori keagenan ini telah diterapkan Di dalam lembaga publik, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah, baik dengan disadari atau tida. Pemerintahan daerah di Indonesia adalah salah satunya. Selain itu, sejak pemerintah daerah diberi otonomi dan desentralisasi pada tahun 1999. Menyusun anggaran APBD 2020-2022 adalah tugas utama Pemerintah lokal, termasuk pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. analisis kinerja anggaran untuk seluruh perangkat kerja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan kinerja relisasi anggaran Kabupaten karawang lebih baik jika tingkat penyerapan anggaran lebih tinggi, dan sebaliknya, kinerja anggaran lebih buruk jika tingkat penyerapan anggaran lebih rendah. Persentasi Anggaran dan realisasi anggaran kabupaten karawang pada tahun 2020 (98,28%), tahun 2021 (96,28) Dan pada tahun 2022 (100.01) Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa performa finansial dipengaruhi oleh tingkat kemandirian finansial daerah. Dengan demikian, Berikut adalah formulasi hipotesis untuk penelitian ini:

H1: Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan

2. Rasio efektivitas dengan kinerja keuangan

analisis kinerja Lk dan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Karawang selama periode anggaran 2020-2022 yang disampaikan secara daring dapat membantu mengurangi biaya. Kemampuan suatu daerah untuk mengandalkan sumber daya yang dimilikinya dibandingkan dengan sumber-sumber dari luar diukur dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: mencapai 111,57%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan

anggaran sebelumnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Karawang berhasil mencapai Pendapatan Asli Daerah yang telah ditentukan. Untuk mempertahankan prestasi ini, pemerintah daerah harus terus menghasilkan uang sebanyak mungkin. Untuk meningkatkan PAD, inisiatif dan komitmen Pemerintah Daerah sangat penting.

Dari penjelasan sebelumnya, Dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efektivitas memiliki dampak pada kinerja finansial.Berikut adalah formulasi hipotesis untuk penelitian ini:.

H2 : Rasio efektivitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan

3. **Rasio efisiensi dengan kinerja keuanga**n

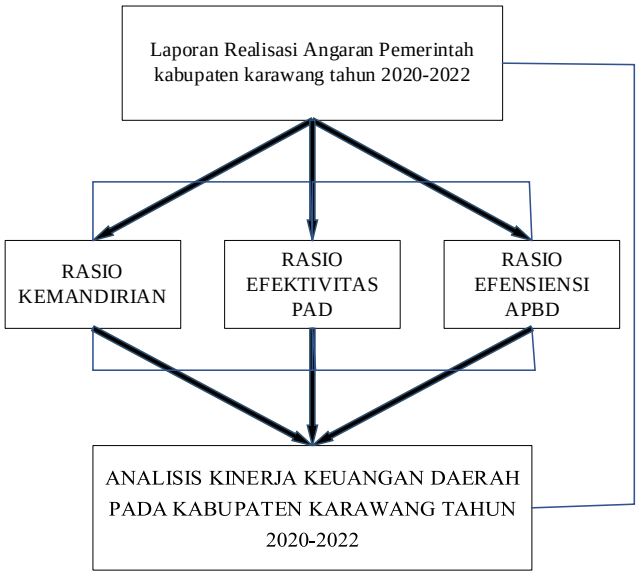
Teori prinsipal-agensinya pemahaman tentang tanggung jawab dalam kerangka ekonomi dan alasan di baliknya. mengapa pemerintah daerah dengan sukarela memberikan laporan keuangan dan non-keuangan. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan rasio memiliki dampak pada kinerja finansial. Selain itu, , Berikut adalah formulasi hipotesis untuk penelitian ini:

Hasil penelitian menunjukkan kemampuan keuangan dari kabupaten karawang pada tahun 2020-2022 kemandirian keuangan daerah Tren menunjukkan peningkatan positif dengan rata-rata tingkat kemandirian keuangan sebesar 70,31%, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 111,57%, dan efisiensi 96,57%. Meskipun begitu, Mayoritas anggaran masih digunakan untuk biaya tetap, namun rasio pendapatan operasional terhadap total pengeluaran selalu berubah dan semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja keuangan Kabupaten Karawang. diperlukan Kabupaten Karawang

H3: Rasio Efisiensi berpengaruh terhadap kinerja keuangan

PARADIGMA PENELITIAN/KERANGAKA BERPIKIR

Gambar 1 Paradigma Penelitian



METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif, yaitu pendekatan yang berlandaskan pada filsafat positivisme, seperti yang dinyatakan oleh Sugiyono (2016). Pendekatan ini menggunakan perangkat penelitian untuk mengumpulkan data dan menganalisis populasi atau sampel tertentu. Analisis data adalah prosedur yang ketat dan sistematis yang menggunakan metode kuantitatif dan statistik untuk menilai hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Instansi yang dimaksud, yaitu kantor BAPENDA Kabupaten Karawang, menyediakan data sekunder untuk penelitian ini. Catatan dan dokumen terkait lainnya juga diterima. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi terdiri dari yang disajikan meliputi Data umum dan data yang ditargetkan. Data umum menyajikan ringkasan komprehensif mengenai BAPENDA Kabupaten Karawang, sementara data khusus terdiri dari laporan realisasi anggaran dari pemerintah daerah yang diterima dari BAPENDA Kabupaten Karawang tahun 2020 -2022

B. Tabel Operasioanal Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Kinerja Keuangan	Rasio Keuangan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah,Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi	Interval

C. Populasinya Penelitian

Populasi adalah faktor penting yang memerlukan perhatian menyeluruh bagi peneliti untuk mencapai Hasil yang dapat diandalkan dan relevan untuk area atau subjek penelitian tersebut. Dalam konteks studi ini, wilayah yang menjadi fokus adalah Kabupaten Karawang.

D. Sampel Penelitian

Populasi adalah faktor penting yang memerlukan perhatian menyeluruh bagi peneliti untuk mencapai Informasi yang dapat diandalkan dan relevan untuk area atau objek penelitian tersebut.Dalam konteks penelitian ini kelompok yang menjadi fokus analisis adalah Kabupaten Karawang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menerapkan strategi atau pendekatan yang dikenal sebagai teknik Langkah pertama dalam melakukan penelitian adalah mengumpulkan data yang relevan. saya. Dalam kerangka penelitian ini, strategi pengumpulan data yang diterapkan berfungsi sebagai bukti. Salah satu metode pengumpulan informasi adalah melalui dokumentasi. melibatkan analisis Bahan-bahan tertulis yang terkait dengan subjek penelitian, seperti publikasi, jurnal, regulasi, dan laporan. kegiatan, dan sebagainya.

F. Teknik Pengolah Data

Proses penggalian Proses persiapan Pengelolaan data melibatkan persiapan data dari setiap variabel penelitian sehingga siap untuk analisis.. Untuk mengumpulkan data yang komprehensif dari setiap objek untuk setiap variabel yang diteliti, pengolahan data meliputi penyuntingan data, transformasi data (pengkodean), dan tampilan data

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil/Analisis Data

1. Data Khusus

Data khusus dalam laporan ini meliputi LRA Kabupaten Karwang untuk tahun 2020-2022. Tabel berikut menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran.dapat dilihar dari table

a. LRA Tahun 2020

Tabel 4 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO	Keterangan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
1	**PENDAPATAN**	**4.298.882.299.398,00**	**4.374.266.860.730,35**	**98,28%**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**1.093.226.521.195,00**	**1.303.353.416.438,35**	**83,88%**
1.2	**Pendapatan Transfer**	**2.898.376.284.729,00**	**2.764.028.910.356,00**	**104,86%**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**	**2.035.457.380.270,00**	**1.990.406.413.616,00**	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	335.344.730.027,00	293.267.130.995,00	
1.2.1.2	Dana Bagi Bukan Hasil Pajak(SDA)	61.386.849.056,00	57.048.679.904,00	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.216.809.308.021,00	1.211.636.504.021,00	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	421.916.493.166,00	428.454.098.696,00	
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**307.279.493.474,00**	**306.884.533.936,00**	**100,13%**
2	**BELANJA**	**4.439.363.271.318,00**	**4.169.175.569.090,50**	**106,48%**
2.1	**Belanja Operasi**	**3.405.433.634.346,50**	**3.147.394.191.315,50**	**108,20%**
2.2	**Belanja Modal**	**285.182.287.218,50**	**277.221.396.937,00**	**102,87%**
2.3	**Belanja Tak Terduga**	**145.658.297.000,00**	**141.663.547.885,00**	**102,82%**
2.4	**Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA**	**603.089.052.753,00**	**602.896.432.953,00**	**100,03%**
	Surplus (Defisit)	**-140.480.971.920,00**	**205.091.291.639,85**	

Telah diketahui bahwa pendapatan Kabupaten Karawang dapat melebihi anggaran yang dialokasikan. Hal ini dapat dibandingkan dengan realisasi belanja daerah yang melebihi

anggaran yang dialokasikan. Postur APBD Kabupaten Karawang tahun 2020 mengalami kelebihan sebesar Rp 205.091.291.639,85

b. **LRA Tahun 2021**

Tabel 5 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

NO	Keterangan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1	**PENDAPATAN**	**4.767.488.626.307,00**	**4.951.680.888.844,00**	**96,28%**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**1.427.192.019.181,00**	**1.651.850.841.989,00**	**86,40%**
1.2	**Pendapatan Transfer**	**3.070.278.889.126,00**	**3.029.850.463.855,00**	**101,33%**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**	**2.045.186.601.083,00**	**2.064.399.869.185,00**	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	332.507.763.612,00	377.053.774.892,00	
1.2.1.2	Dana Bagi Bukan Hasil Pajak(SDA)	41.616.934.321,00	50.530.913.601,00	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.199.911.350.000,00	1.199.911.350.000,00	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	471.150.553.150,00	436.903.830.692,00	
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**270.017.718.000,00**	**269.979.583.000,00**	**100,01%**
2	**BELANJA**	**5.111.060.889.866,62**	**4.670.671.298.817,62**	**109,43%**
2.1	**Belanja Operasi**	**3.452.844.811.501,62**	**3.070.365.297.563,62**	**112,46%**
2.2	**Belanja Modal**	**1.009.570.146.684,00**	**955.603.523.632,00**	**105,65%**
2.3	**Belanja Tak Terduga**	**16.949.571.000,00**	**13.724.400.000,00**	**123,50%**
2.4	**Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA**	**631.696.360.681,00**	**630.978.077.622,00**	**100,11%**
	Surplus (Defisit)	**-343.572.263.559,62**	**281.009.590.026,38**	

Telah diketahui bahwa pendapatan Kabupaten Karawang dapat melebihi anggaran yang dialokasikan. Hal ini dapat dibandingkan dengan realisasi belanja daerah yang melebihi anggaran yang dialokasikan. Postur APBD Kabupaten Karawang tahun 2021 mengalami kelebihan sebesar Rp 281.009.590.026,38

c. LRA Tahun 2022

Tabel 6 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO	Keterangan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	
1	**PENDAPATAN**	**4.802.913.411.541,00**	4.802.598.262.500,00	**100,01%**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**1.621.685.295.499,00**	**1.617.783.012.031,00**	**100,24%**
1.2	**Pendapatan Transfer**	**3.165.428.116.042,00**	**3.171.144.250.469,00**	**99,82%**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**	**2.234.722.487.656,00**	**2.245.012.786.660,00**	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	298.641.597.000,00	324.701.914.374,00	
1.2.1.2	Dana Bagi Bukan Hasil Pajak(SDA)	33.609.494.000,00	63.659.940.449,00	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.186.271.850.080,00	1.180.625.850.080,00	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	716.199.546.576,00	676.025.081.757,00	
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**15.800.000.000,00**	**13.671.000.000,00**	**115,57%**
2	**BELANJA**	**5.407.159.745.413,00**	**4.806.740.763.915,00**	**112,49%**
2.1	**Belanja Operasi**	**3.641.121.735.834,00**	**3.177.822.614.519,00**	**114,58%**
2.2	**Belanja Modal**	**1.110.525.559.679,00**	**993.705.467.696,00**	**111,76%**
2.3	**Belanja Tak Terduga**	**22.380.000.000,00**	**2.110.231.800,00**	**1060,55%**
2.4	**Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA**	**633.132.449.900,00**	**633.102.449.900,00**	**100,00%**
	Surplus (Defisit)	**-604.246.333.872,00**	**-4.142.501.415,00**	

Telah diketahui bahwa pendapatan Kabupaten Karawang dapat melebihi anggaran yang dialokasikan. Hal ini dapat dibandingkan dengan realisasi belanja daerah yang melebihi anggaran yang dialokasikan. Postur APBD Kabupaten Karawang tahun 2022 mengalami kelebihan sebesar Rp -4.142.501.415,00

2. Analisis Data

Studi ini menganalisis performa finansial pemerintah daerah Kabupaten Karawang, dengan fokus mengevaluasi prestasi yang telah diraih oleh kabupaten tersebut selama delapan tahun, dari 2020 hingga 2022. Dalam menilai Untuk mengevaluasi kinerja Tiga jenis rasio yang

berbeda digunakan dalam penelitian ini: rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian. Apa yang terjadi ketika angka-angka ini dilihat?.

a. Rasio Kemandirian Daerah

Berikut perhitungan APBD Kabupaten Karawang Dengan menggunakan indikator RKKD digunakan rumus sebagai berikut:

$$\textbf{Rasio Kemandirian} = \frac{\textbf{Realisasi (PAD)}}{\textbf{Pendapatan Trasnfer}} \textbf{ x 100\%}$$

Tabel 7 Kriteria RKKD

Kategori	Kemandirian (%)
Sangat efektif	Diatas 100 %
Efektif	90% -100%
Cukup efektif	80%-90%
Kurang efektif	60%-80%
Tidak efektif	Kurang dari 60 %

RKKD Tahun Anggaran 2020 $= \frac{1.990.406.413.616,00}{2.764.028.910.356,00} \times 100\% = 72,01\%$

RKKD Tahun Anggaran 2021 $= \frac{2.064.399.869.185,00}{3.029.850.463.855,00} \times 100\% = 68,14\%$

RKKD Tahun Anggaran 2022 $= \frac{2.245.012.786.660,00}{3.171.144.250.469,00} \times 100\% = 70,80\%$

Hasil perhitungan menunjukkan bPada tahun 2020, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 72,01%. Namun, menurut penilaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun tersebut belum memenuhi kriteria efektivitas yang ditetapkan. Sehingga, terjadi penurunan pada rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2021 menjadi 68,14%, yang juga dikategorikan sebagai kurang efektif. Sementara pada tahun anggaran 2022, persentasenya naik menjadi 70,80%, tetapi tetap diklasifikasikan sebagai kurang efektif.

b. Rasio Efektivitas

Rasio efisiensi mengevaluasi bagaimana pengeluaran dibandingkan dengan laba yang dihasilkan oleh sumber-sumber lokal (PAD). Namun, rasio efektivitas mempertimbangkan yaitu diproyeksikan. Dinas Pendapatan Daerah menggunakan teknik yang tepat kab.Karawang melakukan perhitungan APBD sebagai berikut:

$$\textbf{Rasio Efektivitas :} \frac{\textbf{Target Penerimaan PAD Yang DIterapkan}}{\textbf{Berdasarkan Potensi Rill Daerah}} \textbf{X100\%}$$

Tabel 8 Kriteria Rasio Efektifitas Keuangan Daerah

Presentase (%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Rasio Efektifitas Tahun 2020 = $\frac{\textbf{1.303.353.416.438,35}}{\textbf{1.093.226.521.195,00}}$ x100% = 119,22%

Rasio Efektifitas Tahun 2021 = $\frac{\textbf{1.651.850.841.989,00}}{\textbf{1.427.192.019.181,00}}$ x100% = 115,74%

Rasio Efektifitas Tahun 2022 = $\frac{\textbf{1.617.783.012.031,00}}{\textbf{1.621.685.295.499,00}}$ x100% = 99,76%

Dari perhitungan tersebut, dapat disimpulkan Pada tahun anggaran 2020, efektivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang terukur sebesar 119,22%. Menurut standar evaluasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang pada tahun tersebut, rasio efektivitas pada tahun anggaran 2020 diklasifikasikan sebagai sangat efektif. Namun, pada tahun anggaran 2021, rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 115,74%, yang masih dikategorikan sebagai sangat efektif. Sementara pada tahun anggaran 2022, persentasenya turun secara signifikan menjadi 99,76%, yang dikategorikan sebagai cukup efektif.

c. Rasio Efisiensi

Berikut ini cara mengetahui rasio efisiensi: Rasio efisiensi keuangan menunjukkan bagaimana jumlah total uang yang dihabiskan untuk menghasilkan uang dibandingkan dengan jumlah total uang yang dihasilkan. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah adalah nama angka ini. Semakin rendah jumlah efisiensinya semakin tidak efisien pemerintah daerah tersebut..

Rasio Efisiensi = $\frac{\textbf{Realisasi Belanja Daerah}}{\textbf{Realisasi Pendapatan Daerah}}$ **x 100%**

Tabel 9 Kriteria Rasio Efesiensi

<10%	Sangat Efisien
10%-20%	Efisien
21%-30%	Cukup Efisien
31%-40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

Rasio Efisiensi Tahun 2020 = $\frac{4.169.175.569.090,50}{4.374.266.860.730,35}$ x100% = 95,31%

$$\text{Rasio Efisiensi Tahun 2021} = \frac{4.670.671.298.817,62}{4.951.680.888.844,00} \times 100\% = 94,32\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Tahun 2022} = \frac{4.806.740.763.915,00}{4.802.598.262.500,00} \times 100\% = 100,09\%$$

Berdasarkan Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran tersebut, efisiensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang dapat diidentifikasi melalui rasio tersebut 2020 adalah sebesar 95,31%. Menurut kriteria evaluasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang pada tahun tersebut, rasio efisiensi pada tahun anggaran 2020 diklasifikasikan sebagai tidak efisien. Namun, pada tahun anggaran 2021, rasio efisiensi mengalami penurunan persentase anggarannya. 94,32% dikategorikan tidak efisien, begitupun dengan tahun anggaran 2022 persentasenya mengalami penaikan signifikan yaitu 100,09% dikategorikan tidak efisien

Berikut Rekapitulasi Rasio Keuanngan Daerah Kabupaten Karawang Rahun Anggaran Tahun 2020-2022

Tabel 10 Rekapitulasi Rasio Keuanngan Daerah Kabupaten Karawang Rahun Anggaran Tahun 2020-2022

Tahun	Rasio Kemandirian		rasio efektifitas		rasio efisiensi	
	persen%	Kriteria	persen%	Kriteria	persen%	Kriteria
2020	72,01%	Kurang Efektif	119,22%	Sangat Efektif	95,31%	Tidak Efisien
2021	68,14%	Kurang Efektif	115,74%	Sangat Efektif	94,32%	Tidak Efisien
2022	70,80%	Kurang Efektif	99,76%	Sangat Efektif	100,09%	Tidak Efisien

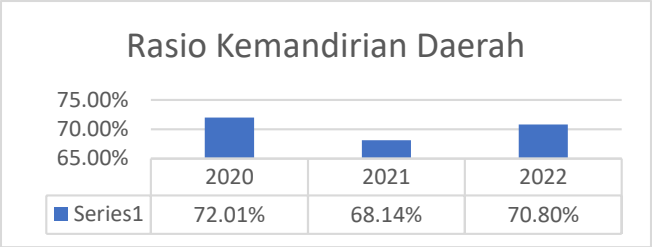
B. Pembahasan

Rasio-rasio keuangan berikut ini diperoleh dari rangkuman rasio-rasio yang telah disebutkan di atas Indikator kemandirian keuangan daerah

a. Rasio Kemandirian Daerah

Rincian berikut ini diungkapkan oleh perhitungan rasio: Tingkat otonomi keuangan relatif antar daerah saat ini berada pada 2020 72,01% Kurang Efektif ,2021 68,14% Kurang Efektif & 2022 70,80% Kurang Efektif. Grafik 1 di bawah ini memberikan informasi lebih lanjut.

Grafik 1 Rasio Kemandirian Daerah



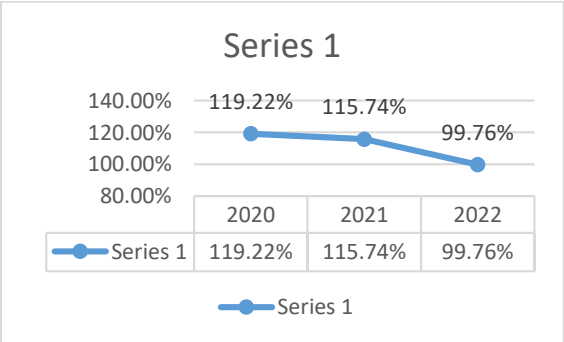
Grafik di atas ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2022. Dari kedua cara tersebut, ada banyak perbedaan. Kami menggunakan rasio menentukan sejauh mana suatu daerah mandiri secara finansial. Indeks otonomi keuangan di tingkat daerah memberikan gambaran seberapa efisien suatu daerah dalam mendukung operasional, pertumbuhan, dan pelayanan pemerintahnya sendiri kepada warga Individu yang telah memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak dan retribusi berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Penurunan otonomi keuangan daerah dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan kurangnya efisiensi, sebagaimana dibuktikan oleh ringkasan rasio otonomi keuangan daerah pada tahun 2020 (dengan 72,01% diklasifikasikan sebagai kurang efektif). Posisi keuangan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 68,14%. Meskipun keadaan keuangan pada tahun 2022 masih mengalami kemandirian keuangan daerah yang kurang efektif 70,80%.

b. Rasio Efektifitas

Hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan sebagai berikut:

Data mengindikasikan bahwa pada tahun 2020, rasio efektivitas mencapai 119,22%. Pada tahun 2021, rasio ini mengalami penurunan menjadi 115,74%, sedangkan pada tahun 2022, tercatat penurunan lebih lanjut menjadi 99,76%. Informasi lebih lanjut terdapat dalam Grafik 2 di bawah.

Grafik 2 Rasio Efektifitas



Grafik tersebut menunjukkan bahwa terdapat variasi kenaikan dan penurunan, dengan rasio efektivitas yang menunjukkan penurunan antara tahun 2020 s/d 2022. Rasio Rasio

efektivitas merujuk pada Keterampilan pemerintah daerah dalam mencapai pendapatan lokal sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mempertimbangkan potensi sebenarnya di wilayah tersebut dalam konteks ini. Berdasarkan rekapitulasi rasio efektivitas, posisi keuangan pada tahun 2021 adalah 115,74%, yang mengindikasikan adanya penurunan efektivitas keuangan daerah meskipun masih tergolong sangat efektif pada tahun 2020. Pada tahun 2020, posisi keuangan sebesar 119,22%,menunjukkan sangat efektif. Pada tahun 2021 dan 2022, posisi keuangan sebesar 99,76%yang menunjukkan sangat efektif, pada tahun 2022 posisi keuangan sebesar 99,76% yang menunjukkan efektif.

c. Rasio Efisiensi

Tabel 11 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD	Kriteria
2020	**4.169.175.569.090,50**	**4.374.266.860.730,35**	95,31%	Tidak Efisien
2021	**4.670.671.298.817,62**	**4.951.680.888.844,00**	94,32%	Tidak Efisien
2022	**4.806.740.763.915,00**	**4.802.598.262.500,00**	100,09%	Tidak Efisien

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang tahun 2020-2022 juga terus menerus mengalami peningkatan seperti terlihat pada table 8. Pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 4.374.266.860.730,35 ,lalu di tahun 2021 naik lagi menjadi Rp.19.632.577.136.890, lalu naik lagi di tahun 2017 menjadi Rp. 4.951.680.888.844,00 dan pada 2022 turun menjadi Rp. 4.802.598.262.500,00,.

Tabel 11 Berdasarkan data yang diberikan, Dapat diamati bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Karawang pada periode 2020-2022 memiliki variasi angka yang berbeda: 95,31% untuk tahun 2020, 94,32% untuk tahun 2021, dan untuk tahun 2022. sebesar 100,09%. Dari hasil perhitungan yang tertera dalam tabel 4.10, kinerja keuangan daerah Kabupaten Karawang dalam periode tersebut dapat dikategorikan sebagai Tidak Efisien. Hal ini terjadi karena semua persentasenya melebihi 40%. Penyebabnya dapat dilihat dari proporsi besar Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Karawang Tahun 2020-2022 dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah. Faktor-faktor yang memengaruhi realisasi belanja termasuk Pengeluaran untuk operasional, modal, tak terduga, dan transfer/ kecamatan dan dinas kota

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Kinerja Kemandirian keuangan daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dikategorikan tinggi apabila memiliki struktur hubungan delegatif dan angka antara 75 hingga 100%.

100% agar struktur hubungannya bersifat delegatif. Dari tahun 2020 hingga 2022, persentase pasien dengan RKKD pada lutut adalah 2020 72,01% Kurang Efektif ,2021 68,14% Kurang Efektif & 2022 70,80% Kurang Efektif Pola hubungan nya menunjukkan bahwa daerah telah memiliki kurang kemampuan dan kemandirian penuh dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, sehingga perlu lagi ada intervensi dari pemerintah pusat.

2. Kinerja Rasio Efektifitas

Kinerja Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Karawang menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, dengan standar antara 95% hingga 120%, berdasarkan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (REPAD). Berikut ini adalah angka REPAD secara berurutan: 119,22%, 115,74% & 99,76% dari tahun 2020 hingga 2022.

3. Kinerja Rasio Efesiensi

Kinerja Kinerja finansial pemerintah Kabupaten Karawang tercermin dari tingkat Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) yang relatif tinggi. REKD tergolong tidak efisien karena persentasenya melebihi 40%. Dari tahun 2020 hingga 2022, REKD berada pada angka sebagai berikut: 95,31%, 94,32%, dan 100,09%. Hal ini disebabkan oleh perbandingan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah kabupaten Karawang dengan Realisasi Pendapatan Daerah, yang menunjukkan ketidak-efisienan. Realisasi belanja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti dana bagi hasil antara kecamatan dan dinas kota, Pengeluaran untuk operasional dan investasi, pengeluaran yang tidak terduga, serta pengeluaran untuk transfer.

b. Saran

Setelah menjalankan penelitian ini, penulis dapat mengusulkan sejumlah saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Karawang secara khusus dan masyarakat secara umum. Saran-saran tersebut termasuk hal-hal berikut::

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Karawang

Diharapkan Pemerintah Kabupaten Karawang mampu mengoptimalkan penerapan pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan kinerja keuangan yang sehat sesuai dengan tujuan Pemetintah Kabupaten karawang. Oleh karena itu, belanja modal yang dialokasikan pada aset tetap akan bermanfaat dalam jangka panjang dan menghasilkan keuntungan di kemudian hari, sehingga memerlukan perhatian yang lebih besar. dalam jangka panjang agar dapat memetik hasilnya di kemudian hari. masa depan. Tingkat kemandirian yang tinggi dan berkurangnya ketergantungan pada pemerintah pusat merupakan dua faktor yang akan berdampak positif dari kinerja yang kuat.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Agar dapat memberikan hasil penelitian yang lebih luas, Diharapkan peneliti berikutnya yang meneliti kinerja keuangan daerah dapat menyusun penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam dengan memperluas analisis ke sejumlah rasio Dengan meluaskan cakupan, sehingga dapat mengungkapkan hasil yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Apriyanti, A., & Fadli, U. M. D. (2023). Analisis Perilaku Kerja Pegawai Kelurahan Nagasari Karawang. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, *2*(3).

Fitriyani, I., Sumbawati, N. K., & Puspita, B. (2019). Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi \& Bisnis*, *7*(1), 26–36.

Karina, A., & Noerainy, D. (2016). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *AkunNas*, *13*(1).

Mahmudi.2010.Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Kedua.Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.

Pandjaitan, M. F., Tommy, P., & Untu, V. N. (2018). Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah kota manado tahun 2011-2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *6*(3).

Putra, Windhyu. 2018. "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah". Depok. Rajawali Press.

Sains, F. S. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *The New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud." Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, *4*(1), 21–46.

Wijaya, T. (2013). Metodologi penelitian ekonomi dan bisnis teori dan praktik. *Yogyakarta: Graha Ilmu*, *6*.

Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *4*(2), 187–195. https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284